



Sekretariat Jenderal DPR RI



2022

Laporan Kinerja
Biro Persidangan I

Tim Penyusun

Pengarah :

Suprihartini, S.IP., M.Si.

Ketua:

Dra. Etmita Ardem, M,Si

Sekretaris:

Effie, S.Sos., M.A.P.

Anggota:

Sartomo, S.S., M.Si.

Mahmud, S.E.

Novianti, S.E.

Drs. Achmad Agus Thomy

Nunik Prihatin B., S.H.

Dewi Resmini, S.E., M.Si.

Dra. Nanik Herry Murti,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Ida Nuryanti, S.Sos., M.A.

Dadang Prayitna, S,IP., MH.

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.

Muhammad Yus Iqbal, S.E.

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H.

Anggrek Kurnianti, S.H., M.H.

Dahliya Bahnan, S.H., M.H.

Sagung Agung Putu, S.Y., S.H., M.H.

Eguh Setiawan, S.IP.

Ikawati, S.E., M.M.

Dedi, S.Sos.

Dwiyanti, S.Sos.

Agus Widijatmoko, S.H.

Aprilia Dessy Kurniati, S.E.

Iis Anisa, S.E., M.Si.M.

Semiyati, S.E.

Nofia Dewita, S.S., M.Si.

Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda, S.Sos.

Anisa Nur Nia Rahmah, S.I.P.



KATA PENGANTAR

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Persidangan I, Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan I tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan I dalam menyelenggarakan dukungan persidangan komisi, persidangan parpurna, dan pelaksanaan dukungan penyusunan rrisalah apat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. . Laporan kinerja ini menyajikan gambaran tentang capaian indikator kinerja utama Biro Persidangan I sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Persidangan I melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan I ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 disajikan dalam empat bab. Bab I Pendahuluan menginformasikan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Biro Persidangan I serta aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja terdiri atas penjelasan singkat Renstra Deputi Bidang Persidangan dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 beserta metode penghitungannya. Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan tentang capaian kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah disusun dan analisisnya. Selanjutnya di Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan ke depan sehingga kinerja Biro Persidangan I menjadi lebih baik lagi.

Secara umum, capaian kinerja di tahun 2022, Biro Persidangan I telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan sangat tinggi dan penggunaan anggaran yang efisien. Semua itu dapat terlaksana berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Biro Persidangan I beserta *stakeholders* serta Pimpinan Setjen DPR RI yang senantiasa memberikan arahan agar kami *on the track*. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Persidangan I atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan evaluasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO PERSIDANGAN I

Suprihartini, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM | DASAR HUKUM | TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

URAIAN RINGKAS TENTANG RENSTRA | RENCANA KINERJA 2022
| PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2022 |
ALOKASI ANGGARAN

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA | ANALISIS INDIKATOR KINERJA BIRO
PERSIDANGAN I

25

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN | REKOMENDASI

46

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Biro Persidangan I Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 2	Jumlah Pegawai Bagian Risalah	6
Tabel 3	Analisis Beban Kerja Biro Persidangan I	11
Tabel 4	IKU Deputi Bidang Persidangan	14
Tabel 5	Keselarasannya Kinerja Deputi Bidang Persidangan dengan Kinerja Biro Persidangan I	15
Tabel 6	Nilai Indeks sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	19
Tabel 7	Satuan target indikator kinerja	19
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022	20
Tabel 9	Estimasi Kerangka Pendanaan dalam Renstra	21
Tabel 10	Indikator Kinerja, Target, Realisasi/Capaian Tahun 2022	22
Tabel 11	Sasaran Program Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 13	Jumlah Rapat-Rapat Komisi I s.d. Komisi XI Tahun 2022 Berdasarkan Tiga Fungsi DPR	25
Tabel 14	Pengukuran Kinerja Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang Dimanfaatkan oleh DPR RI ..	27
Tabel 15	Realisasi Indikator Kinerja 2020 - 2022	28
Tabel 16	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	30
Tabel 17	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022	31
Tabel 18	Pengukuran Kinerja Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR Tahun 2022	32
Tabel 19	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	32
Tabel 20	Analisa Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 21	Capaian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022	38
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2020, 2021, dan 2022	39
Tabel 23	Kemajuan Capaian Sasaran Program Jangka Menengah	39
Tabel 24	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	41
Tabel 25	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	42

Tabel 26	Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020.....	42
Tabel 27	Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen.....	43
Tabel 28	Analisa Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Struktur Organisasi Biro Persidangan I.....	5
GAMBAR 2	Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I Berdasarkan Pendidikan ...	7
GAMBAR 3	Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)	8
GAMBAR 5	<i>Cascading</i> Setjen DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan I	17
GAMBAR 6	Tampilan <i>website</i> sirih.dpr.go.id	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan I untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 terdiri atas satu sasaran program, yaitu “Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah”, yang memuat empat indikator kinerja, yaitu.

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan.
4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I.

Sebagai bentuk keseriusan Biro Persidangan I dalam memberikan pelayanan prima, keempat indikator kinerja di atas selanjutnya menetapkan target-target yang disusun menggunakan metodologi perhitungan tertentu. Dari hasil analisa, Biro Persidangan I menetapkan target, seperti pada tabel di bawah ini. Seluruh target telah tercapai, bahkan terdapat dua indikator kinerja yang melebihi target.

Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI/ CAPAIAN
Satker Setjen				
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
	2	Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan	100%	100%

		Rakyat Republik Indonesia		
	3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,31	3,32
	4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%	99,54 %

Dengan alokasi dukungan dana sebesar **Rp11.069.833.000,00** maka Biro Persidangan I telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022. Faktor keberhasilan yang menunjang tercapainya seluruh target di atas, antara lain karena koordinasi dan pendampingan yang intensif kepada unit kerja yang berada di bawah Biro Persidangan I. Ke depan, Biro Persidangan I berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerjanya, antara lain.

1. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Biro Persidangan I.
2. Menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pelayanan kepada Anggota Dewan, khususnya dalam rangka pelaksanaan persidangan.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan untuk memastikan segalanya berjalan dengan baik.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam upaya mewujudkan dukungan yang profesional dan akuntabel, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Biro Persidangan I selalu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu aspek capaian kinerja organisasi dan aspek akuntabilitas keuangan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena seluruh program dan kegiatan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja lembaga.



BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

2022

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut, salah satunya dilakukan melalui kegiatan persidangan.

Penyelenggaraan persidangan (rapat-rapat) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi DPR. Semua pengambilan keputusan DPR pada dasarnya secara formal dilakukan dalam persidangan. Oleh sebab itu, akses menghadiri sidang-sidang (rapat) menjadi bagian dari asas keterbukaan dan kunci penting bagi partisipasi masyarakat. Rapat DPR yang bersifat terbuka menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan DPR yang akuntabel dan transparan. Kegiatan persidangan DPR dilaksanakan dalam lima kali masa sidang untuk satu tahun sidang dan dilaksanakan oleh alat kelengkapan Dewan, yang salah satunya adalah komisi.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Biro Persidangan I yang merupakan salah satu *supporting system* Dewan di Sekretariat Jenderal DPR RI mengemban tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dukungan Biro Persidangan I kepada Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilaksanakan melalui kegiatan persidangan di komisi (rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja), kegiatan persidangan paripurna (dalam rangka pengambilan keputusan/persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang dan/atau pejabat publik), serta penyusunan risalah rapat-rapat Dewan.

Dalam memberikan dukungan administrasi dan persidangan bagi DPR, Biro Persidangan I melaksanakan penyiapan skenario rapat, laporan singkat, dan risalah rapat. Produk-produk persidangan DPR mencerminkan bahwa kebijakan, keputusan, dan program-program pembangunan telah dihasilkan DPR melalui pelaksanaan ketiga fungsi DPR.

Sebagai *supporting system*, Biro Persidangan I dituntut bekerja secara profesional, modern, dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan dukungan yang profesional dan akuntabel, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Biro Persidangan I selalu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya perbaikan dapat dilihat dari aspek capaian kinerja organisasi dan aspek akuntabilitas keuangan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena seluruh program dan kegiatan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja lembaga.

Sebagai unit pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Persidangan I berkewajiban memberikan informasi mengenai capaian kinerja Biro Persidangan I dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk itu, Biro Persidangan I menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

I.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;

- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI;
- g) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021;

I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai salah satu unit yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, dalam melaksanakan tugasnya Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi, yaitu.

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- c. pelaksanaan rapat di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan persidangan paripurna;

- d. pelaksanaan tata usaha persidangan di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan persidangan paripurna;
- e. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah;
- g. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Persidangan I memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Sekretariat Komisi I s.d. Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi I s.d. XI.

Bagian Sekretariat Komisi terdiri dari:

- 1) Subbagian Rapat;
- 2) Subbagian Tata Usaha.

- b. Bagian Persidangan Paripurna mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha persidangan paripurna.

Bagian Persidangan Paripurna terdiri dari:

- 1) Subbagian Rapat;
- 2) Subbagian Tata Usaha.

- c. Bagian Risalah, mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan risalah rapat DPR.

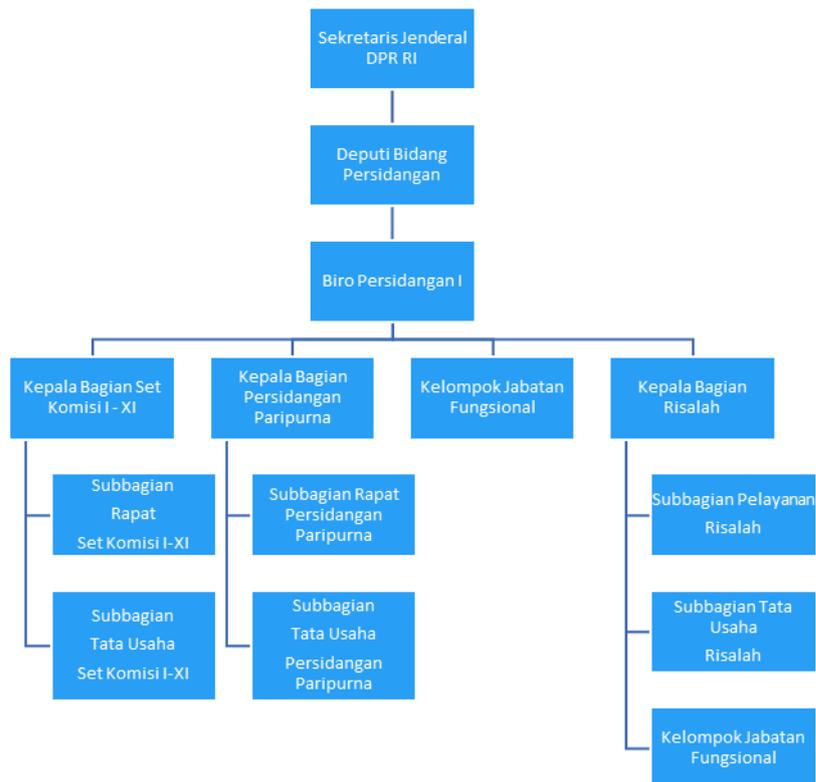
Bagian Risalah terdiri dari

- 1) Subbagian Pelayanan Risalah;
- 2) Subbagian Tata Usaha Risalah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

I.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Persidangan I, sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERSIDANGAN I



Sumber : Persekjen Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

I.3.3 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Biro Persidangan I didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari pegawai struktural yang bertugas di Sekretariat Komisi, Sekretariat Persidangan Paripurna, dan Bagian Risalah, serta didukung juga oleh jabatan fungsional tertentu, yaitu Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

Adapun jumlah SDM Biro Persidangan I sebanyak 141 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro Persidangan I berdasarkan jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH ORANG
1	Kepala Biro Persidangan I	1 Orang

2	Bagian Sekretariat Komisi I	6 Orang
3	Bagian Sekretariat Komisi II	8 Orang
4	Bagian Sekretariat Komisi III	8 Orang
5	Bagian Sekretariat Komisi IV	9 Orang
6	Bagian Sekretariat Komisi V	10 Orang
7	Bagian Sekretariat Komisi VI	7 Orang
8	Bagian Sekretariat Komisi VII	6 Orang
9	Bagian Sekretariat Komisi VIII	8 Orang
10	Bagian Sekretariat Komisi IX	7 Orang
11	Bagian Sekretariat Komisi X	7 Orang
12	Bagian Sekretariat Komisi XI	10 Orang
13	Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna	6 Orang
Jumlah		93 Orang

Selanjutnya, dalam hal pemenuhan dukungan ketersediaan risalah rapat, Biro Persidangan I membawahi satu unit kerja, yaitu Bagian Risalah. Secara struktur organisasi, Bagian Risalah memiliki karakteristik yang berbeda karena selain diisi oleh pejabat struktural, Bagian Risalah juga diisi oleh Jabatan Fungsional yang membidangi risalah. Adapun jumlah SDM beserta jenjang jabatannya sebagai berikut:

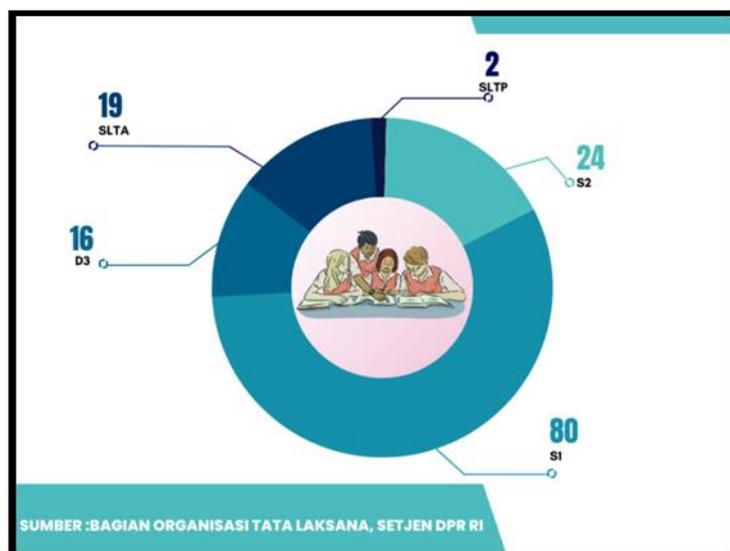
Tabel 2 Jumlah Pegawai Bagian Risalah

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1	Struktural	6 Orang
2	Fungsional	
	a. Perisalah Legislatif Ahli Madya	6 Orang

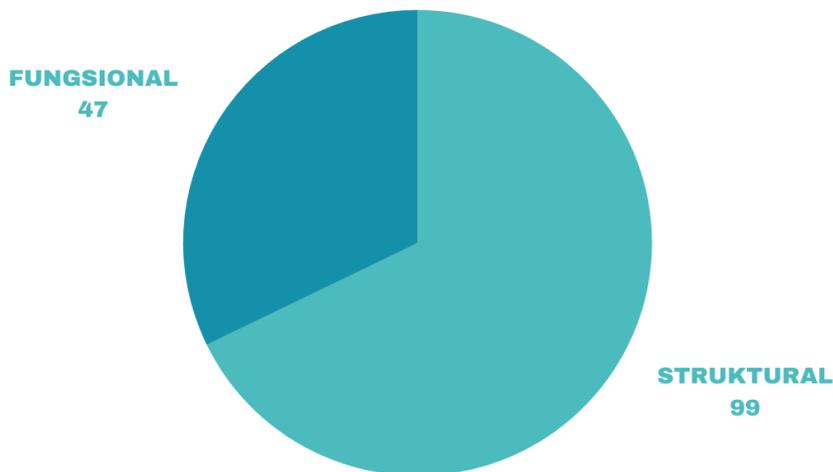
b.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	11 Orang
c.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	12 Orang
d.	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	8 Orang
e.	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	0 Orang
f.	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	10 Orang
Total Fungsional		47 orang

Adapun untuk tingkat pendidikan, SDM di Biro Persidangan I terdiri dari S2: 24 orang, S1: 80 orang, D3: 16 orang, SLTA: 19 orang, dan SLTP 2 orang.

GAMBAR 2 Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I Berdasarkan Pendidikan



GAMBAR 3 Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)



I.4. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya Biro Persidangan I memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan persidangan di komisi, persidangan paripurna, dan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI, yang meliputi:

a) Kegiatan DPR, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan rapat paripurna;
- 2) pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RUU;
- 3) pelaksanaan pembahasan anggaran mitra kerja komisi;
- 4) pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah;
- 5) pelaksanaan pemberian persetujuan/pertimbangan terhadap pejabat publik (*fit and proper test*);
- 6) pelaksanaan pengawasan terhadap kasus-kasus spesifik.

b) Sekretariat Komisi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- 1) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Komisi;
- 2) penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- 3) pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat komisi;
- 4) pelaksanaan dukungan tata usaha komisi;

- 5) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.
- c) Sekretariat Persidangan Paripurna menyelenggarakan fungsi, yaitu:
- 1) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Persidangan Paripurna;
 - 2) penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
 - 3) pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat persidangan paripurna;
 - 4) pelaksanaan dukungan tata usaha persidangan paripurna, dan
 - 5) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.
- d) Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi, yaitu:
- 1) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah;
 - 2) penyusunan bahan kegiatan di bidang persiapan dan penyusunan risalah;
 - 3) pelaksanaan pendistribusian sumber daya perisalah dan memastikan proses pelaksanaan transkrip serta penyusunan risalah;
 - 4) pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah;
 - 5) pelaksanaan persiapan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 6) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

I.4.1 Aspek Strategis Biro Persidangan I

Biro Persidangan I mempunyai kedudukan yang strategis dalam pencapaian kinerja DPR RI, yakni sebagai ujung tombak yang memberikan dukungan pelaksanaan persidangan Komisi I s.d. Komisi XI, Persidangan Paripurna, serta penyiapan dan penyusunan risalah rapat-rapat Dewan dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Tahun sidang dibagi dalam lima masa persidangan, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah. Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Penyelenggaraan persidangan (rapat-rapat) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen. Semua pengambilan keputusan parlemen pada dasarnya secara formal dilakukan dalam persidangan. Oleh sebab itu, akses menghadiri sidang (rapat) menjadi bagian dari asas keterbukaan informasi publik dan kunci penting bagi partisipasi masyarakat. Rapat-rapat DPR yang bersifat terbuka menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan parlemen yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, jaminan keterbukaan informasi publik, pemberian akses terhadap persidangan, serta kemauan untuk memperhatikan masukan publik menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas representasi anggota DPR, khususnya dalam melaksanakan fungsi dewan yang pro rakyat.

Untuk mendukung keberhasilan jalannya persidangan DPR maka peranan Sekretariat Komisi, Sekretariat Persidangan Paripurna, dan Sekretariat Bagian Risalah yang merupakan lingkup dari Biro Persidangan I memainkan peranan penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan dukungan persidangan komisi, Sekretariat Komisi menyiapkan skenario rapat dan laporan singkat dari hasil pelaksanaan rapat-rapat di komisi, di samping juga melaksanakan tugas lainnya dalam memberikan dukungan kepada dewan.

Untuk kegiatan sidang paripurna, Sekretariat Persidangan Paripurna menyiapkan skenario rapat paripurna, termasuk skenario Rapat Paripurna dalam rangka Sidang Bersama DPR dan DPD RI dan Sidang RAPBN yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus. Kegiatan Sidang 16 Agustus merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional karena pada kegiatan sidang tersebut Presiden RI memberikan Pidato Kenegaraan dan Pidato Pengantar Nota Keuangan.

Di samping Sekretariat Komisi dan Sekretariat Persidangan Paripurna, Biro Persidangan I juga didukung oleh Bagian Risalah yang bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan risalah rapat-rapat komisi dan badan, serta rapat paripurna.

I.4.2 Permasalahan yang Dihadapi

Sumber daya Manusia memiliki peranan yang penting bagi kemajuan organisasi. Maju dan berkembangnya suatu organisasi sangat berpengaruh pada

kekuatan sumber daya manusia yang ada, baik dilihat dari kapabilitas (kemampuan) maupun dari kuantitas (jumlah) SDM yang ada. Kemampuan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan usia. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka dapat mempengaruhi kapabilitas individu dalam menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya (pendekatan kognitif). Di samping pendidikan, usia juga sangat mempengaruhi dalam kemajuan suatu organisasi. Seiring berjalannya waktu, organisasi secara aktif mencari individu yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan terbuka terhadap perubahan.

Jumlah SDM di Biro Persidangan I dilihat dari kuantitas yang ada masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana hasil analisis beban kerja, sebagaimana tertuang dalam SK Sekjen DPR RI Nomor 2462/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.

Tabel 3 Analisis Beban Kerja Biro Persidangan I

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Biro Persidangan I membutuhkan pegawai sebanyak 279 orang, sedangkan pegawai yang ada baru mencapai 151 orang. Untuk menghindari adanya hambatan kinerja akibat kekurangan sumber daya

NO	UNIT KERJA (BAGIAN)	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH KEKURANGAN
	BIRO PERSIDANGAN I	151	279	129

Sumber: *SK Sekjen DPR RI Nomor 2462/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022*

manusia, maka diperlukan dukungan tenaga Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN). Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi perlu dilakukan oleh Biro Persidangan I:

1. Penambahan jumlah SDM dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan, serta peningkatan penguasaan teknologi informasi dan peningkatan kualitas hasil kerja/profesional sehingga dapat memberikan dukungan yang prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana, khususnya teknologi Informasi untuk mendukung kinerja Biro Persidangan I dalam memberikan pelayanan prima kepada Anggota Dewan. Melalui teknologi informasi, maka peran-peran Anggota DPR di dalam persidangan, hasil-hasil persidangan, maupun berbagai informasi publik lainnya dapat diakses publik, sebagai bentuk transparansi parlemen.

Dengan akses yang baik serta tersedianya teknologi informasi yang diperlukan, masyarakat dapat mengetahui proses pembuatan undang-undang serta pengambilan keputusan sehingga dapat mengambil peran dan posisi yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan dan keputusan yang dihasilkan DPR benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus akan memperkuat eksistensi dan legitimasi Anggota DPR karena masyarakat dapat mengetahui aktivitas, program, ataupun inisiatif Anggota Dewan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

3. Menciptakan organisasi yang tepat ukuran, efektif, dan efisien pada setiap unit organisasi di Biro Persidangan I sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. URAIAN RINGKAS TENTANG RENSTRA

Biro Persidangan I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Renstra Deputi Bidang Persidangan tahun 2019-2024 sebagai garis besar sasaran yang ingin dicapai. Dalam bab ini akan memaparkan visi, misi, serta tujuan Deputi Bidang Persidangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi Biro Persidangan I.

II.1.1 Visi

Untuk mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Deputi Bidang Persidangan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut.

“Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang profesional dan modern dalam mendukung visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan Deputi Bidang Persidangan berkinerja optimal melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Setjen DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kemudahan akses informasi bagi publik.

II.1.2 Misi

Misi Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan dua tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

- a. terwujudnya dukungan persidangan yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih.

Deputi Bidang Persidangan memiliki tiga sasaran strategis dan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 IKU Deputi Bidang Persidangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	BB	A	A	A
	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3.22	3.24	3.26	3.28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang	BB	A	A	AA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
yang berkualitas	Persidangan				
	2. Nilai evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	B	B	A	A

II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Persidangan sebagaimana yang terdapat pada tabel 4 menjadi dasar bagi Biro Persidangan I dalam menetapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dari Renstra Deputi Bidang Persidangan. Pemilihan indikator kinerja Biro Persidangan I disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan pada lingkungan Biro Persidangan I yang dijabarkan dalam tabel berikut:

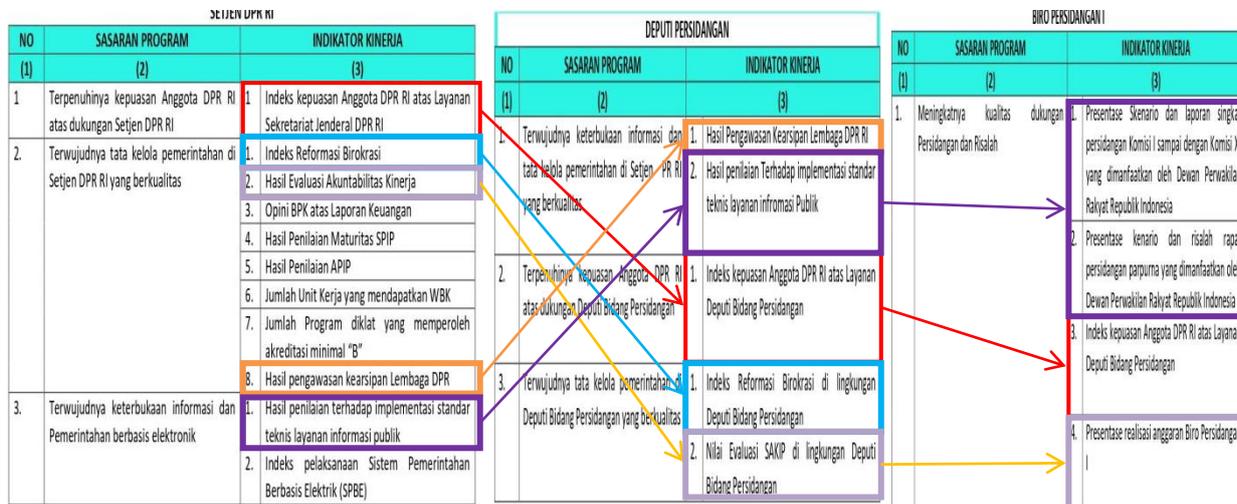
Tabel 5 Keselarasan Kinerja Deputi Bidang Persidangan dengan Kinerja Biro Persidangan I

SASARAN PROGRAM	KINERJA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	KINERJA BIRO PERSIDANGAN I
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menyusun skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		Menyusun skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas	Indeks kepuasan anggota atas layanan

dukungan Deputi Bidang Persidangan	layanan Deputi Bidang Persidangan	persidangan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I

Kegiatan yang ditetapkan oleh Biro Persidangan I selanjutnya dikelompokkan ke dalam satu subjek, yaitu “sasaran program”. Sasaran program merupakan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022. Biro Persidangan I menetapkan **“Meningkatkan kualitas dukungan persidangan dan risalah rapat”** untuk dijadikan sebagai sasaran program. Keselarasan antara Kinerja Deputi Bidang Persidangan dengan Biro Persidangan I digambarkan dalam *cascading* sebagai berikut.

GAMBAR 4 Cascading Setjen DPR RI, Deputy Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan



Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kesuksesan dari Renstra Deputy Bidang Persidangan, Biro Persidangan I menentukan target dari setiap kegiatan yang terdapat di dalam tabel 5. Namun, dalam penyusunan target ini, terdapat beberapa satuan hasil dari indikator kinerja antara Deputy Bidang Persidangan dengan Biro Persidangan I yang berbeda, yaitu pada indikator persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I.

Adapun penjelasan atas satuan hasil dari indikator Kinerja Biro Persidangan I sebagai berikut :

- **Menghitung pelaksanaan penyusunan skenario rapat dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Persentase**

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I s.d. Komisi XI.

Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan kepada Anggota DPR RI/alat kelengkapan dewan.

Untuk menghitung capaian kinerja menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran terdapat lima masa persidangan. Setiap masa persidangan berakhir, maka proses kinerja yang dihasilkan sebesar 20%. Meskipun secara satuan target berbeda dengan yang ditetapkan oleh Renstra, ***persentase pelaksanaan penyusunan skenario rapat dan laporan singkat sudah bisa memberikan gambaran terhadap penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik yang informatif atau tidak.***

- ***Menghitung pelaksanaan penyusunan skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan persentase.***

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terselesainya skenario dan risalah rapat pada rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/alat kelengkapan dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

- ***Menghitung Realisasi Anggaran Biro Persidangan I***

Penghitungan kinerja “Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I” dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran terhadap DIPA.

Sementara indikator kinerja Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan memiliki satuan hasil yang sama dengan satuan hasil kinerja yang ditetapkan pada sasaran program Deputi Bidang Persidangan. Hal ini dikarenakan indikator kinerja yang ditetapkan sama dengan apa yang ditetapkan pada Deputi

Bidang Persidangan, sehingga penjabaran terhadap perhitungan indikator tersebut adalah menghitung ***Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan***.

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan” dilakukan melalui survei kepada Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI pada Oktober-Desember 2022 untuk menilai kinerja Biro Persidangan I dalam memberikan layanan persidangan dalam kurun waktu Januari-Desember 2022. Survei berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 6 Nilai Indeks sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

Dari penjelasan di atas, dapat ditentukan besaran target yang ingin dicapai sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kinerja yang maksimal. Berikut target yang disusun ke dalam tabel satuan target indikator kinerja.

Tabel 7 Satuan Target Indikator Kinerja

NO	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	SATUAN	TARGET
1.	Menyusun skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Persentase	100 %

2.	Menyusun skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Persentase	100 %
3.	Indeks kepuasan Anggota atas layanan persidangan	Nilai Indeks	3.31
4.	Optimalisasi realisasi anggaran	Persentase	100%

II.3. PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan program turunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja/instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan I untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 terdiri atas satu sasaran program, yang memuat empat indikator kinerja. Indikator kinerja Biro Persidangan I selaras dengan indikator kinerja Deputy Bidang Persidangan.

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,31
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%

II.4. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Biro Persidangan I dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Setjen DPR RI tahun 2022. Alokasi pagu anggaran Biro Persidangan I Satker Setjen pada tahun 2022 sebesar Rp11.069.833.000,00 dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp11.018.719.620,00.

Berdasarkan kerangka pendanaan menengah Renstra Deputi Bidang Persidangan, Biro Persidangan I mendapat estimasi kerangka pendanaan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Estimasi Kerangka Pendanaan dalam Renstra

SASARAN PROGRAM	ESTIMASI KERANGKA PENDANAAN DALAM RENSTRA				PAGU	CAPAIAN	%
	2021	2022	2023	2024	2022	REALISASI/ TAHLIN 2022	
Persidangan Komisi dan Paripurna	Rp9.189.285.000,00	Rp13.764.261.000,00	Rp14.177.188.000,00	Rp14.602.503.000,00	Rp11.069.833.000,00	Rp11.018.719.620,00	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara estimasi kerangka pendanaan pada tahun 2022 antara Pagu dalam Renstra Deputi Bidang Persidangan sebesar Rp13.764.261.000,00 berbeda dengan pagu anggaran yang diperoleh Biro Persidangan I Rp11.069.833.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.694.428.000. Hal tersebut disebabkan adanya pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan pada kementerian dan lembaga yang dipicu gejolak ekonomi global yang menyebabkan inflasi di dalam negeri.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal DPR RI serta dalam rangka memberikan dukungan pelayanan yang prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, termasuk di dalamnya dukungan administrasi dan persidangan, Biro Persidangan I pada tahun 2022 telah menetapkan satu sasaran program, yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah” dengan empat indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2022, penetapan indikator kinerja telah berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan masukan/arahan dari KemenPAN & RB, bahwa kinerja dari unit Eselon II harus memberikan dampak bagi organisasi.

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar lebih baik dari tahun ke tahun. Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diperjanjikan. Secara rata-rata capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 102,42% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2022 sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10 Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Satker Setjen					
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
	2	Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan	100%	100%	100%

		oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia			
	3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,31	3,32	100,30%
	4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%	99,54 %	109,38%

III.2. ANALISA INDIKATOR KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

Pada Tahun 2022, Biro Persidangan I mampu menyelesaikan semua indikator kinerjanya dengan baik dan tercapai sesuai target. Analisis keberhasilan dari tiap-tiap indikator tersebut mengacu pada tujuh poin yang tertuang di dalam Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

III.2.1 PERSENTASE SKENARIO DAN LAPORAN SINGKAT PERSIDANGAN KOMISI I S.D. XI YANG DIMANFAATKAN OLEH DPR RI

Tabel 11 Sasaran Program Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI

III.2.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari seluruh skenario dan laporan singkat yang disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI seluruhnya telah dimanfaatkan. Tabel persandingan dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 12 Perbandingan Target dan Relisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100%

Dalam mendukung kegiatan Dewan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Biro Persidangan I menyiapkan beberapa dokumen materi persidangan di komisi, yang meliputi.

a) Skenario Rapat

Skenario rapat adalah suatu kertas kerja yang dipergunakan sebagai acuan pimpinan rapat pada pelaksanaan rapat yang berisikan informasi, antara lain, penyampaian jenis rapat, sifat rapat, kuorum rapat, tema rapat, dan poin-poin yang terkait dengan tema yang akan dibahas sebagai gambaran awal bagi peserta rapat dan informasi pendukung lainnya, jika diperlukan.

Skenario rapat digunakan sebagai panduan bagi pimpinan rapat untuk memimpin dan mengendalikan rapat agar rapat berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran, serta tidak menyimpang dari substansi yang tengah dibahas.

Output : Tersedianya skenario rapat sebelum rapat dimulai, yang disesuaikan dengan materi pembahasan dan peraturan perundang-undangan.

Outcome : Rapat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan materi rapat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memperlancar proses pengambilan keputusan.

b) Laporan Singkat Rapat

Laporan *singkat* adalah laporan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat (Pasal 303 ayat (3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib)

Output : Tersedianya laporan singkat yang memuat gambaran singkat proses pelaksanaan rapat dan kesimpulan, dan/atau keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.

Outcome : Laporan singkat hasil rapat dapat menjadi bahan dan informasi bagi Anggota DPR serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk melakukan tindak lanjut hasil keputusan.

Adapun pelaksanaan rapat-rapat Komisi I s.d. Komisi XI pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Jumlah Rapat-Rapat Komisi I s.d. Komisi XI Tahun 2022 Berdasarkan Tiga Fungsi DPR RI

RAPAT-RAPAT FUNGSI LEGISLASI

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS III	1	4	1	0	1	2	0	3	1	23	2
2	MS IV	2	0	5	0	1	2	0	3	2	7	0
3	MS V	14	7	13	0	7	4	1	0	0	13	3
4	MS I	9	5	3	0	1	3	2	1	3	1	0
5	MS II	3	0	8	2	-	2	1	1	0	4	8

RAPAT-RAPAT FUNGSI ANGGARAN

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS III	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MS IV	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MS V	8	5	14	9	12	11	10	12	11	14	8
4	MS I	16	5	18	13	14	11	16	9	23	21	7
5	MS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

RAPAT-RAPAT FUNGSI PENGAWASAN

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS III	20	7	11	23	23	21	30	23	22	18	17
2	MS IV	14	3	14	18	15	15	20	14	21	26	11
3	MS V	12	3	1	14	16	22	30	18	21	13	2
4	MS I	12	9	4	6	16	23	19	16	15	23	18
5	MS II	9	9	2	15	18	29	31	13	26	23	10

Capaian indikator kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI”, dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100%, yang meliputi skenario dan laporan singkat Komisi I s.d. Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2021–2022, serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2022–2023, yang terdiri dari satu dokumen per masa sidang untuk pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penetapan Masa Sidang tersebut merupakan kewenangan Badan Musyawarah DPR RI (*Pasal 51 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020*

tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya).

Pengukuran kinerja dari tiap-tiap unit yang melaksanakan indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Pengukuran Kinerja Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang Dimanfaatkan oleh DPR RI

INDIKATOR KINERJA	KINERJA	
	TARGET	CAPAIAN
Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang Dimanfaatkan oleh DPR RI:		
1. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi I	100%	100%
2. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi II	100%	100%
3. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi III	100%	100%
4. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi IV	100%	100%
5. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi V	100%	100%
6. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi VI	100%	100%
7. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi VII	100%	100%
8. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi VIII	100%	100%
9. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi IX	100%	100%
10. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi X	100%	100%
11. Persentase skenario dan laporan	100%	100%

singkat persidangan Komisi XI		
-------------------------------	--	--

Berdasarkan Tabel 14. bahwa capaian “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI”, dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100%, yang meliputi skenario dan laporan singkat Komisi I s.d. Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2021–2022, serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2022–2023, yang terdiri dari satu dokumen per masa sidang untuk pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

III.2.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022

Pengukuran indikator kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI” juga dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Dengan data capaian pada tahun tersebut, Biro Persidangan I dapat mempertahankan target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Realisasi Indikator Kinerja 2020 - 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

III.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024 (Akhir Renstra)

Pada Gambar 4 *cascading* Setjen DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan I diperlihatkan bahwa indikator “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI” selaras

dengan indikator “Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik” yang merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra Deputi Bidang Persidangan.

Pada renstra ditetapkan bahwa pada tahun 2024, hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik telah mendapatkan predikat “Informatif”. Dengan demikian capaian 100% pada tahun 2022 yang diperoleh Biro Persidangan I dalam mewujudkan indikator kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI” telah mendorong indikator kinerja “hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik” menuju predikat “Informatif”

III.2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Kementerian/Lembaga

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja Biro Persidangan I dengan indikator kinerja kementerian/lembaga lainnya.

III.2.1.5 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. komitmen pimpinan untuk menyiapkan skenario dan menyusun laporan singkat pada Komisi I s.d. Komisi XI tepat waktu;
2. memaksimalkan SDM yang ada agar komitmen dan profesional dalam menjalankan tugas.
3. adanya *standard operating procedures* (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan.

III.2.1.6 Upaya yang Dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target kinerja adalah

1. meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pada pelatihan/*workshop* sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan unit kerja untuk menyusun skenario dan laporan singkat;

2. berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas skenario rapat dan kecepatan penyelesaian laporan singkat.

III.2.1.7 . Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100	100	100%	Rp 0	Rp 0	0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah” dengan indikator kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI.” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

III.2.2 CAPAIAN PERSENTASE SKENARIO DAN RISALAH RAPAT PERSIDANGAN PARIPURNA YANG DIMANFAATKAN OLEH DPR RI

III.2.2.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk indikator kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI”, sebagai berikut.

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%

Sesuai Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali Rapat Paripurna DPR Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Tata Tertib DPR RI.

Penjadwalan rapat paripurna ditentukan oleh rapat Badan Musyawarah DPR mengingat Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah dan jangka waktu penyelesaian RUU dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya (Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI).

Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir dan undangan yang hadir. (Pasal 301 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib).

Pada tahun 2022, target skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI adalah 100% dalam lima masa sidang, yaitu Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2021–2022, serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2022-2023, sementara capaian persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI telah terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 18 Pengukuran Kinerja Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	KINERJA	
	TARGET	CAPAIAN
Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR	100%	100%

Adapun kegiatan rapat-rapat paripurna tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I laporan kinerja ini.

III.2.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

III.2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024 (Akhir Renstra)

Indikator kinerja “Persentase skenario rapat dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” memiliki keselarasan dengan indikator Kinerja “Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik” pada Renstra Deputi Bidang Persidangan. Dengan melihat capaian yang diraih Biro Persidangan I sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Persidangan I telah mendukung tercapainya

target penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dengan kategori “Informatif”.

III.2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Kementerian/Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dengan indikator kinerja kementerian/lembaga lainnya.

III.2.2.5 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain.

1. memaksimalkan SDM yang ada agar komitmen dan profesional dalam menjalankan tugas.
2. meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung substansi dalam menyusun skenario dan risalah rapat sidang paripurna.

III.2.2.6 Upaya yang Dilakukan.

Selain faktor keberhasilan yang dipaparkan pada III.2.1.5 ada beberapa kegiatan yang mendukung terhadap keberhasilan Biro Persidangan I dalam mencapai indikator capaian 100%. Kegiatan tersebut adalah :

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Skenario Rapat Persidangan Paripurna.

Penyempurnaan SOP Penyusunan Skenario Rapat Persidangan Paripurna disahkan oleh Kepala Biro Persidangan I pada tanggal 21 November 2021 dan diterapkan pada awal tahun 2022. SOP tersebut selain untuk memberikan kepastian hukum, juga dibentuk untuk memberikan rambu-rambu (standar waktu penyelesaian) kepada pihak yang terlibat di dalam pembuatan skenario rapat.

2. Pengembangan/pemutakhiran/pengintegrasian Sistem Informasi

Biro Persidangan I telah menghasilkan inovasi-inovasi dalam penyajian, penyimpanan, dan pengolahan bahan-bahan persidangan, antara lain melalui sistem informasi Simfoni, SiPerdana, dan Sirih Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka Biro Persidangan I telah melakukan, antara lain:

a. **Pengintegrasian dan Pengembangan Simfoni (Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja).**

Simfoni merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk berbagi data dan informasi antara alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja secara *online* dan terintegrasi. Simfoni telah diintegrasikan dengan aplikasi lainnya, yaitu e-parlemen yang digunakan untuk anggota DPR.

b. **Pengembangan Sistem Informasi Persidangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (SIPERDANA)**

SiPerdana merupakan suatu sistem penyediaan dokumen digital bagi pimpinan dan anggota dewan pada saat pelaksanaan rapat paripurna. Saat ini SiPerdana telah dikembangkan dengan sistem BAST (Berita Acara serah terima berbasis digital). BAST merupakan dokumen legalitas yang menerangkan penyerahan bahan rapat paripurna dari pemberi data (AKD dan Kementerian/Lembaga) kepada bagian Persidangan Paripurna selaku verifikator yang dibuat secara digital. Simfoni dan SiPerdana juga merupakan satu instrumen dalam pengambilan data dukung untuk penyusunan risalah rapat.

c. **Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Risalah (SIRIH)**

Di samping melaksanakan pengembangan/ pemutakhiran/ pengintegrasian sistem informasi, Biro Persidangan I juga telah melakukan inovasi dalam **Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Risalah (SIRIH) untuk menunjang penyusunan risalah rapat.**

Aplikasi tersebut memberikan kemudahan kepada petugas penyusun risalah dalam melakukan koordinasi di tiap jenjang Jabatan Fungsional dalam penyusunan transkrip dan risalah rapat. Dengan adanya bantuan aplikasi tersebut, waktu penyusunan risalah bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi SIRIH.

GAMBAR 5 Tampilan website sirih.dpr.go.id

WIB	Persidangan Paripurna	Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	Rapat Paripurna DPR RI KE-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 Acara : 1. Laporan Komisi XI DPR RI Atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Yang Diajukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Dan Kementerian Keuangan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 2. Laporan Komisi I DPR RI Atas Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 Dan Kapal KRI Teluk Peny-513 Pada Kementerian Pertahanan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 4. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI. 5. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI Tentang 5 (Lima) RUU Yaitu : 1) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat; 2) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Riau; 3) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Jambi; 4) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTB; 5) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTT. Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI. 6. Perpanjangan waktu terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.	Terbuka	Rapat Paripurna	EDIT
08-02-2022 13:39 s.d. 14:36 WIB	Persidangan Paripurna	Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	Rapat Paripurna DPR RI KE-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 Acara : 1. Laporan Komisi XI DPR RI Atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Yang Diajukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Dan Kementerian Keuangan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 2. Laporan Komisi I DPR RI Atas Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 Dan Kapal KRI Teluk Peny-513 Pada Kementerian Pertahanan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 4. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI. 5. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI Tentang 5 (Lima) RUU Yaitu : 1) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat; 2) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Riau; 3) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Jambi; 4) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTB; 5) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTT. Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI. 6. Perpanjangan waktu terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.	Terbuka	Rapat Paripurna	EDIT
18-01-2022 10:24 s.d. 13:13 WIB	Persidangan Paripurna	Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2021-2022	1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara.	Terbuka	Rapat Paripurna	EDIT
11-01-2022 10:51 s.d. 11:46 WIB	Persidangan Paripurna	Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 (Dilanjutkan dengan Pelantikan Antanwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)	Terbuka	Rapat Paripurna	EDIT

Sumber : www.sirih.dpr.go.id

III.2.2.7 . Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20 Analisa Efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100	100	100%	Rp 0	Rp 0	0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah” dengan indikator kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

III.2.3 INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPR RI ATAS LAYANAN PERSIDANGAN

III.2.3.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala, minimal satu kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, Setjen DPR RI melakukan survei kepada Anggota Dewan selaku penerima layanan (pengguna). Indeks kepuasan Anggota DPR RI diperoleh melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen DPR RI yang dilakukan terhadap Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Setjen DPR RI dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada Oktober-Desember

2022 untuk menilai kinerja Setjen DPR RI dalam kurun waktu Januari-Desember 2022. Survei ini dilakukan untuk mengukur kepuasan terhadap berbagai macam layanan yang disediakan oleh Setjen DPR RI, termasuk layanan yang diberikan oleh Biro Persidangan I. Survei ini menggunakan ukuran tingkat kepuasan Skala Likert 1 sampai dengan 4 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, dan skala tertinggi 4 = Sangat Puas).

Secara keseluruhan, unsur-unsur penilaian dalam kuesioner yang dilakukan pada survei ini meliputi **sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi dan perilaku SDM; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; sarana dan prasarana; serta keahlian.** Sementara unsur penilaian yang relevan pada Biro Persidangan I berdasarkan survei yang dilakukan meliputi **sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis pelayanan; dan kompetensi dan perilaku SDM.**

a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- 1) Layanan Setjen DPR RI dalam **memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI** sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.

Nilai indeks kepuasan atas layanan Setjen DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja tahun 2022 mencapai **3,39**.

- 2) Kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur layanan Setjen DPR RI

Nilai indeks kepuasan atas layanan Setjen DPR RI dalam memberikan kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur bagi Anggota DPR RI tahun 2022 mencapai 3,33.

- 3) Kemudahan mendapatkan layanan persidangan yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI

Nilai indeks kepuasan Anggota DPR RI dalam kemudahan mendapatkan layanan administrasi yang dibutuhkan tahun 2022 mencapai 3,32.

b. Waktu Penyelesaian

Indikator survei “waktu penyelesaian” digunakan untuk mengukur kecepatan unit kerja dalam memberikan pelayanan bagi anggota DPR RI. Secara khusus yang berkaitan dengan Biro Persidangan I adalah layanan persidangan. Nilai indeks anggota DPR RI atas kecepatan Setjen DPR RI dalam memberikan layanan persidangan di Biro Persidangan I mencapai 3,31.

c. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Secara khusus pada indikator “Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan” yang berkaitan oleh Biro Persidangan I adalah layanan persidangan. Nilai indeks kualitas dan ketepatan Biro Persidangan I Setjen DPR RI dalam memberikan layanan persidangan sebesar 3,30.

d. Kompetensi dan Perilaku SDM

Dalam nilai indeks Kompetensi dan Perilaku SDM secara keseluruhan diperoleh penilaian sebesar **3,31**. Capaian kinerja Biro Persidangan I pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada (tabel 20).

Tabel 21 Capaian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,31	3,32	100,30%

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

III.2.3.2 . Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021, kinerja Biro Persidangan I di tahun 2022 mengalami peningkatan (tabel 22). Target kinerja di tahun 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan target kinerja tahun 2021 karena saat penyusunan target tahun 2022 belum diketahui hasil dari pencapaian di 2021. Hasil capaian kinerja di tahun 2022 akan menjadi fondasi/dasar dalam penentuan target kinerja di tahun selanjutnya.

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,30	3,30	100%	3,31	3,30	99%	3,31	3,32	100,30%

III.2.3.3 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024 (Akhir Renstra)

Selanjutnya, dibandingkan target jangka menengah di tahun 2024, yang telah dicapai di tahun 2022 hampir mendekati target tersebut (table 22).

Tabel 23 Kemajuan Capaian Sasaran Program Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,32	3,34	98%

III.2.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Kementerian/Lembaga

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan” dengan indikator kinerja kementerian/lembaga lainnya.

III.2.3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Peningkatan kinerja pada indikator indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan yang diberikan Biro Persidangan I dapat terjadi karena beberapa faktor.

1. Indikator “peningkatan kinerja pada sistem, mekanisme, dan prosedur” adalah dengan pemutakhiran standar *operating* prosedur pada setiap layanan persidangan dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi pada pemberian layanan;
2. Indikator “peningkatan kecepatan waktu pelayanan”, yaitu dengan aplikasi teknologi informasi pada setiap layanan yang diberikan sehingga layanan yang diberikan tepat waktu dalam melayani Anggota DPR RI.
3. Indikator “produk spesifikasi jenis layanan”, dilakukan untuk melihat kualitas dan ketepatan terhadap layanan persidangan. Yang dilakukan adalah membuat *monitoring* dan evaluasi pada setiap produk layanan pada lingkup Biro Persidangan I.
4. Indikator “kompetensi dan perilaku SDM”. Yang dilakukan adalah mendorong SDM di Biro Persidangan I untuk meningkatkan kompetensi dengan beberapa cara, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pelatihan dan Pendidikan Setjen DPR RI maupun peningkatan jenjang pendidikan lebih tinggi.

III.2.3.3 Upaya yang Dilakukan

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Persidangan I selama tahun 2022 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI” terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Persidangan I, meliputi:

- a. Rapat Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Biro Persidangan I sebelum dan sesudah memasuki masa persidangan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan persidangan.
- b. Rapat Internal Biro Persidangan I dengan unit kerja di lingkungan Biro Persidangan I untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja dan solusi atas pemecahan masalah.
- c. Rapat koordinasi alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja.
- d. Penyempurnaan *standard operating procedure* (SOP), seperti:
 1. SOP Verifikasi Bahan Rapat Paripurna dari Komisi, Fraksi dan Kementerian/Lembaga;

2. SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Kerja;
3. SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat;
4. SOP Dukungan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum;
5. SOP Penyusunan dan Penyampaian Naskah Pidato Pimpinan pada Rapat Paripurna, dan
6. SOP lain yang berhubungan dengan dukungan pelaksanaan rapat.

III.2.3.4 . Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan.	3,31	3,32	100,30%	Rp 0	Rp 0	0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Persidangan” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

III.2.4 . PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BIRO PERSIDANGAN I

Pada capaian kinerja ini memperlihatkan mengenai capaian kinerja realisasi anggaran Biro Persidangan I pada tahun 2022 yang bersumber pada **anggaran Satker Setjen DPR RI**. Capaian realisasi anggaran ini penting dipaparkan untuk melihat sejauh mana serapan anggaran Biro Persidangan I tahun 2022 dan perbandingannya dengan serapan anggaran Biro Persidangan I Tahun 2021.

III.2.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Biro Persidangan I Tahun 2022

Pada tahun 2022, Biro Persidangan I mengelola anggaran sebesar **Rp11.069.833.000,00** dan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar **Rp11.018.719.620,00** atau 99,54%. Target Indikator Kinerja “Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I” yang diperjanjikan pada tahun 2022 sebesar 91%, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 109,30%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Rupiah)	REALISASI		TARGET (%)	CAPAIAN
			(Dalam Rupiah)	%		
	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	11.069.833.000,00	11.018.719.620,00	99,54	91	109,38%

III.2.4.2 Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2020- 2022

Realisasi anggaran Biro Persidangan I Tahun 2020-2022 dapat dilihat di pada tabel di bawah ini.

Tabel 26 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

TAHUN	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	CAPAIAN	
			REALISASI	%
2020	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan Risalah	Rp7.163.788.000,00	Rp6.960.002.248,00	97,16
2021	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Rp9.565.929.000,00	Rp9.321.039.850,00	97,44
2022	Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Rp11.069.833.000,00	Rp11.018.719.620,00	99,54

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran Biro Persidangan I Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih kenaikan anggaran pada tahun 2022 sebanyak Rp1.503.904.000,00, sedangkan selisih realisasi anggaran dari tahun 2021 ke tahun anggaran 2022 sebanyak Rp1.697.679.770,00. Sementara persentase realisasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 2,1%.

III.2.4.3 . Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024 (Akhir Renstra)

Dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Periode 2020-2024 memuat perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dalam KPJM hanya memuat periode 2021-2024 dan tidak secara spesifik menyebut Biro Persidangan I, namun hanya persidangan komisi dan paripurna. Berikut rincian

Tabel 27 Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2021 -2024.

SASARAN PROGRAM	ESTIMASI KERANGKA PENDANAAN (DALAM RUPIAH)				CAPAIAN	
	2021	2022	2023	2024	REALISASI /TAHUN	%
Persidangan Komisi dan Paripurna	9.189.285.000	13.764.261.000	14.177.188.000	14.602.503.000	11.018.719.620	

**Data diolah dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI (Perubahan Struktur Organisasi) 2020-2024 Tahun 2021.*

Seperti yang tersedia pada tabel, bahwa estimasi kerangka pendanaan berdasarkan Renstra Setjen DPR RI tahun 2021-2024 pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp13.764.261.000, sementara Pagu anggaran Biro Persidangan I tahun 2022 untuk keperluan layanan persidangan sebesar Rp11.018.719.620. Penurunan pagu anggaran Hal tersebut dikarenakan oleh kebijakan anggaran oleh Kementerian Keuangan sebagai dampak inflasi yang terjadi di Indonesia.

III.2.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Kementerian/Lembaga

Tidak ditemukan data pada realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional yang dimaksud.

III.2.4.5 Faktor Pendukung Keberhasilan

Pada tahun anggaran 2022, Biro Persidangan I memiliki kenaikan anggaran dibandingkan pada tahun 2021. Kenaikan anggaran ini akibat adanya kelonggaran

kebijakan PPKM yang berimplikasi pada kepadatan program kegiatan pada lingkungan Biro Persidangan I, mulai dari Komisi I hingga Komisi XI, Bagian Paripurna, serta Bagian Risalah.

Sementara penyerapan anggaran Biro Persidangan I yang mengalami kenaikan penyerapan, seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dikarenakan adanya percepatan realisasi anggaran di awal tahun anggaran. Dalam rangka mendukung percepatan realisasi anggaran dilakukan *monitoring* secara periodik, per bulan, triwulan, per semester hingga per tahun. Untuk mengatasi serapan anggaran perlu dilakukan perencanaan yang matang di awal tahun anggaran sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang berlebih.

III.2.4.6 Upaya yang Dilakukan

Capaian realisasi kinerja anggaran Biro Persidangan I hampir mencapai 100%. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan perbaikan dalam beberapa hal. Pertama, memastikan kesinambungan antara mekanisme dan prosedur kerja. **Kedua**, memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. **Ketiga**, membangun zona integritas menuju WBK/WBBM Biro Persidangan I. **Keempat**, melakukan evaluasi dan koordinasi antar unit kerja secara periodik agar a dan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

III.2.4.7 . Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 28 Analisa Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	Rp11.069.833.000,00	Rp11.018.719.620,00	99,54%
	Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan	100%	100%	100%			
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan	3,31	3,32	100,30%			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan perisalah” dengan tiga indikator kinerja telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian hampir 100%.



PERSIDANGAN PARIPURNA





RAPAT KOORDINASI BIRO PERSIDANGAN I 2022





BAB IV

PENUTUP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

2022

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Biro Persidangan I beserta jajarannya serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro persidangan 1 telah menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022.

Secara umum banyak pencapaian nilai positif yang telah dilaksanakan oleh Biro Persidangan I pada tahun 2022. Hal ini merupakan kontribusi positif terhadap pencapaian target Biro Persidangan I yang telah dihasilkan dan akan terus ditingkatkan guna merespons tuntutan pelayanan kepada Anggota DPR RI yang semakin tinggi dan sesuai dengan salah satu tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020–2024, yaitu terwujudnya dukungan persidangan dan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I tahun 2022 yang ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan I dengan sasaran program, yaitu meningkatkan kualitas dukungan persidangan dan risalah yang memuat empat indikator kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas.

IV.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2022, Biro Persidangan I telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, hal ini tercermin pada pencapaian seluruh indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI, dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100%, yang meliputi skenario dan laporan singkat Komisi I s.d. Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2021–2022, serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2022–2023.

2. Capaian persentase skenario rapat paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI, dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100%, yang meliputi skenario dan laporan singkat Rapat Paripurna Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2021–2022, serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2022–2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja Biro Persidangan I dengan indikator kinerja kementerian/lembaga lainnya.
4. Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Setjen DPR RI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RRI pada Oktober-Desember 2022 untuk menilai kinerja Setjen DPR RI dalam kurun waktu Januari-Desember 2022. Survei ini dilakukan untuk mengukur kepuasan terhadap layanan yang disediakan oleh Setjen DPR RI, termasuk layanan yang diberikan oleh Biro Persidangan I. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan dengan target 3,31, realisasi 3,32, dengan persentase 100,30%. Dengan demikian realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan kenaikan indeks kepuasan Anggota dengan target 3.31 dan realisasi 3,32, dengan demikian menunjukkan peningkatan dalam aspek sistem, mekanisme dan prosedur waktu penyelesaian produk; spesifikasi jenis layanan kompetensi dan perilaku SDM, penanganan pengaduan, saran, dan masukan; sarana dan prasarana; serta keahlian.

5. Realisasi anggaran Biro Persidangan I mencapai 99,54% dengan mengelola anggaran sebesar Rp11.069.833.000,00, pencapaian realisasi anggaran tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar Rp9.565.929.000,00 dengan realisasi Rp9.321.029.850,00 dengan persentase sebesar 97,44%. Hal itu karena Biro Persidangan mampu mengelola anggaran sesuai dengan yang ditargetkan.
6. Adanya perbedaan Pagu anggaran tahun 2022 antara Renstra Deputi Bidang Persidangan DPR RI dengan Biro Persidangan, yang mana Renstra Deputi Bidang Persidangan tercatat sebesar Rp13.764.261,000,00 sementara pagu Biro Persidangan I sebesar Rp11.018.719.620,00 hal ini disebabkan adanya kebijakan pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan pada

kementerian dan lembaga akibat adanya gejolak ekonomi global, yang menyebabkan inflasi di dalam negeri.

IV.2. REKOMENDASI

Secara keseluruhan sasaran program Biro Persidangan I telah tercapai dengan baik namun untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Persidangan I, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh unit kerja dan jajaran Biro persidangan untuk menjadikan Biro Persidangan I yang profesional dan andal serta bermanfaat sepenuhnya bagi para pemangku kepentingan.
2. Mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada melalui koordinasi yang terus menerus dengan unit terkait.
3. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Biro Persidangan I terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tata kelola layanan persidangan.
5. Peningkatan kualitas SDM secara terus menerus.
6. Pengembangan teknologi informasi berupa SiPerdana, Simfoni, dan SIRIH menjadi titik penting untuk memberikan layanan persidangan yang efektif dan efisien. Namun, diperlukan peningkatan manajemen data yang baik untuk menjaga keamanan dan kebermanfaatan data.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Tabel 0.1 Tabel Rekapitulasi Penyelenggaraan Rapat Paripurna Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA DPR RI SELAMA TAHUN 2022		
NO	RAPAT PARIPURNA	AGENDA RAPAT PARIPURNA
1	Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa 11 Januari 2022)	Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. (Dilanjutkan dengan Pelantikan Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).
2	Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa, 18 Januari 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara.
3	Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa, 8 Februari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komisi XI DPR RI Atas Hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Yang Diajukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Dan Kementerian Keuangan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 2. Laporan Komisi I DPR RI Atas Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 Dan Kapal KRI Teluk Penyus-513 Pada Kementerian Pertahanan RI, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan;

	2022)	<p>4. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI.</p> <p>5. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI Tentang 5 (Lima) RUU Yaitu: 1) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat; 2) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Riau; 3) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Jambi; 4) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTB; 5) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTT. Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI.</p> <p>6. Perpanjangan waktu terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen</p>
4	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Selasa, 15 Februari 2022)</p>	<p>1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang, yaitu: a) RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; b) RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; c) RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; d) RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; e) RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; f) RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; dan g) RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan;</p> <p>3. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap: a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b) Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi; c) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; d) Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana; Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
5	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Selasa, 18 Februari 2022)</p>	<p>1. Laporan Komisi II DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p> <p>2. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022. (Didahului dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota DPR RI dan MPR RI- Sisa Jabatan Tahun 2019-2024)</p>

6	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Selasa, 15 Maret 2022)</p>	<p>Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.</p>
7	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Selasa, 29 Maret 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Anggota BPK RI Periode 2022 – 2027, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan ; 2. Laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
8	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Selasa, 12 April 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komisi I atas hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021 – 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. Laporan Komisi XI atas hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, yaitu 1) RUU tentang Provinsi Papua Selatan; 2) RUU tentang Provinsi Papua Tengah; 3) RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI; 5. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2023, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 6. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap: 1) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 2) UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

		Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) RUU tentang Hukum Acara Perdata; 4) RUU tentang Praktik Psikologi; 5) RUU tentang Landas Kontinen Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan (Didahului dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024)
9	Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 (Kamis, 14 April 2022)	Pidato Ketua DPR RI Pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022
10	Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 (Selasa, 17 Mei 2022)	Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022
11	Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 (Jumat, 20 Mei 2022)	Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023
12	Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa	1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 oleh BPK RI;

	<p>Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa, 24 Mei 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.
13	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa, 31 Mei 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023; 2. Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap Pemberhentian Pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 3. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap: 1) RUU tentang Hukum Acara perdata; 2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
14	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 (Selasa, 14 Juni 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 oleh BPK RI; 2. Laporan Komisi II DPR RI atas Hasil Pembahasan Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 4. Persetujuan Perpanjangan Waktu pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).
15	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021; 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas: a) RUU tentang Provinsi Sumatera Barat; b) RUU tentang Provinsi Riau; c) RUU tentang Provinsi Jambi; d)

	(Kamis, 30 Juni 2022)	<p>RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan e) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas: a) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; b) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan c) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.</p> <p>5. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.</p>
16	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Kamis, 5 Juli 2022)</p>	<p>1. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;</p> <p>2. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP); 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
17	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022</p> <p>(Kamis, 7 Juli 2022)</p>	<p>1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;</p> <p>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI;</p> <p>4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI;</p> <p>5. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-</p>

		2022.
18	<p>Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI</p> <p>(Selasa, 16 Agustus 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidato Pengantar Ketua MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI; 2. Pidato Pengantar Ketua DPR RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI; 3. Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022
19	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Selasa, 16 Agustus 2022)</p>	<p>Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disertai Nota keuangan dan dokumen Pendukungnya,</p>
20	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Jumat, 23 Agustus 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya.
21	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Pengesahan

	<p>Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 30 Agustus 2022)</p>	<p><i>Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);</p> <p>3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Pegesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of Republik Of Indonesia and the Government of the Republic of Korea</i>).</p>
22	<p>Rapat Paripurna DPR RI (KHUSUS) (Selasa, 6 September 2022)</p>	<p>Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka HUT DPR RI Ke-77 dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022</p>
23	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 6 September 2022)</p>	<p>Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021</p>
24	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 20 September 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). 3. Pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 4. Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

		<p>5. Laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO) Ardjuna Sakti, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>6. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang, yaitu: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
25	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2003</p> <p>(Selasa, 27 September 2022)</p>	<p>1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>2. Penetapan pasangan kerja Komisi IV DPR RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.</p>
26	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Kamis, 29 September 2022)</p>	<p>1. Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>2. Penyampaian Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 29 September 2022 terkait Surat Komisi III DPR RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI:</p> <p>4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2023.</p>
27	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I</p>	<p>1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK RI;</p> <p>2. Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Uji Kelayakan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, dilanjutkan</p>

	<p>Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 4 Oktober 2022)</p>	<p>dengan pengambilan keputusan;</p> <p>3. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.</p>
28	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 1 November 2022)</p>	<p>1. Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>2. Dilanjutkan dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.</p>
29	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 (Selasa, 17 November 2022)</p>	<p>1. Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap hasil Pembahasan Uji Kelayakan (<i>Fit and proper test</i>) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, yaitu : 1) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara; 2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan; 3) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat; 4) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah; 5) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur; 6) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku; 7) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan 8) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.</p> <p>3. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>4. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap: 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) RUU tentang Landas Kontinen; Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p> <p>5. Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.</p>

30	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Selasa, 6 Desember 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang kerja Sama Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation</i>); dan 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence</i>).
31	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Selasa, 13 Desember 2022)</p>	<p>Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (<i>Fit and Proper Test</i>) Calon Panglima TNI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
32	<p>Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023</p> <p>(Kamis, 15 Desember 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (<i>Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i>); 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Hasil Pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> 1.2. Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022;

		<p>1.3. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023; dan</p> <p>1.4. Prolegnas Perubahan Keempat RUU tahun 2022-2024;</p> <p>Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>4.</p> <p>idato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.</p>
--	--	--

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2022



RENCANA KERJA TAHUN 2022

BIRO PERSIDANGAN I

Rencana Kerja Tahun 2022

DASAR

1. Renstra Setjen DPR RI tahun 2020 – 2024
2. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2021, meliputi

SASARAN

Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan risalah

INDIKATOR KINERJA/RENCANA KERJA

1. Persentase Skenario dan Laporan Singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI Target : 100 %
2. Persentase skenario dan laporan singkat rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI, Target : 100 %
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan, Target : 3,31
4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I, Target : 91 %

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Biro persidangan I
2. Money dan pengembangan Sistem aplikasi SIMFONI, SI PERDANA dan SIRIH
3. Peningkatan Akses Publik terhadap produk-produk Persidangan

SUMBER PENDANAAN

Usulan Anggaran 2022 Biro Persidangan I sebesar Rp. 14.653.929.000 (sesuai Renstra Setjen DPR RI)

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2022



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I

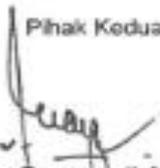
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, 21 Desember 2021
Pihak Pertama,

Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp10.888.890.000,-

Deputi Bidang Persidangan,


 Dra. Damayanti, M.Si
 NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, 21 Desember 2021
 Kepala Biro Persidangan I,


 Supriheni, S.I.P., M.Si
 NIP. 19710106 199003 2 001

LAMPIRAN III

**SURAT TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TUGAS
Nomor : 86/PR.05.04 /01/2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39)
 - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.
 - f. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MENUGASKAN:

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Suprihartini, S.IP., M.Si	197101061990032001	Pengarah
2.	Dra. Etmita Ardem, M.Si.	196402101998032001	Ketua
3.	Effie, S.Sos., M.A.P.	196802151990032003	Sekretaris
4.	Sartomo, S.S., M.Si	196808111996031001	Anggota
5.	Novianti, S.E.	196711041988032001	Anggota
6.	Nunik Prihatin B., S.H.	196912021998032002	Anggota
7.	Dewi Resmini, S.E., M.Si.	197104071992032001	Anggota
8.	Dra. Nanik Herry Murti	196505061994032002	Anggota
9.	Ida Nuryati, S.Sos., M.A.	197604011998032002	Anggota
10.	Muhammad Yus Iqbal, S.E.	196707171993031006	Anggota
11.	Rachmi Suprihartanti Septiningtyas., S.H., M.H.	196709251994032003	Anggota
12.	Anggrek Kurnianti, S.H., M.H.	198111012005022001	Anggota
13.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Anggota
14.	Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H.	197209302000032002	Anggota
15.	Eguh Setiawan, S.IP.	197202221993021001	Anggota
16.	Ikawati, S.E., M.M.	197602032002122001	Anggota
17.	Dedi, S.Sos.	197004171990031004	Anggota
18.	Dwiyanti, S.Sos.	196903131990032002	Anggota
19.	Agus Widijatmoko, S.H.	197110261998031003	Anggota
20.	Aprilia Dessy Kurniati, S.E.	198506292003122001	Anggota
21.	Iis Anisa, S.E., M.Si.M	197609071998032001	Anggota
22.	Semiyati, S.E	196611281988032002	Anggota
23.	Nofia Dewita, S.S., M.Si.	196711081996032001	Anggota
24.	Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda, S.Sos.	199407282019031001	Anggota/Sekretariat
25.	Anisa Nur Nia Rahmah, S. IP.	199410252019032002	Anggota/Sekretariat

Untuk : melaksanakan tugas menyusun Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2022 dan melaksanakan tugas mulai bulan Desember sampai dengan Februari 2022.

Jakarta, 16 Desember 2022
Kepala Biro Persidangan I,



Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 197101061990032001



Sekretariat Jenderal **DPR RI** Biro Persidangan I

2022